

PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Hendrikus Otniel Nasozaro
Staf Pengajar IKIP Gunung Sitoli

RINGKASAN- Penulisan makalah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembangunan karakter bangsa melalui pendidikan kewarganegaraan. Penulisan menggunakan metode tinjauan literatur (*library research*) yaitu metode penulisan yang didasarkan pada pendapat-pendapat ahli dan hasil penelitian terdahulu. Pekerjaan besar bangsa saat Indonesia saat ini harus mengembalikan karakter bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Hal ini dapat dimulai dengan memberikan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan cara baik dan benar, sehingga dapat meningkatkan nilai-nilai karakter bagi setiap masyarakat. Pendidikan dimulai dari proses pendidikan serta ide-ide solutif dari berbagai pihak. Pada saat ini bangsa Indonesia mengalami penurunan konsep moral dan mentalitas akan suatu ideologi asli bangsa Indonesia. Dengan demikian pendidikan karakter tepat untuk mengembalikan nilai-nilai kepribadian setiap warga negara, tetapi hal itu harus diapresiasi oleh semua pihak, walaupun hasilnya akan tercapai setelah satu generasi bangsa Indonesia. Pembelajaran PKN di sekolah dasar dimaksudkan sebagai suatu proses belajar mengajar dalam rangka membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik dan membentuk manusia Indonesia seutuhnya dalam pembentukan karakter bangsa yang diharapkan mengarah pada penciptaan suatu masyarakat yang menempatkan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada Pancasila, UUD dan norma-norma yang berlaku dimasyarakat.

Kata kunci : *pendidikan kewarganegaraan dan karakter bangsa*

PENDAHULUAN

Pendidikan kewarganegaraan merupakan bagian yang utuh dari sistem pendidikan nasional. Proses pendidikan kewarganegaraan telah disusun dalam kurikulum dan pembelajaran di sekolah. Untuk menjamin fungsi dan perannya dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan nasional, pendidikan kewarganegaraan seyogyanya dirancang, dikembangkan, dilaksanakan, dan dievaluasi dalam konteks pengejawantahan tujuan pendidikan nasional. Ketiga hal tersebut merupakan landasan dan kerangka pikir untuk memahami profil mata kuliah/mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan.

Proses pendidikan Kewarganegaraan mampu memberdayakan, membudayakan peserta didik dalam arti bahwa proses dan hasil pendidikan tersebut harus mampu memfasilitasi peserta didik untuk melakukan proses belajar untuk memperluas wawasan (*learning to know*), belajar untuk membangun kemampuan berbuat (*learning to do*), belajar untuk hidup dan berkehidupan (*learning to be*), dan belajar untuk hidup bernegara (*learning to live together*)

(UNESCO : 1996). Pendidikan kewarganegaraan merupakan proses pendidikan untuk membangun keteladanan kemauan dan kemampuan mengembangkan kreatifitas yang mencerminkan jati diri bangsa yang syarat dengan nilai-nilai sosial kultural ke-Indonesiaan.

Dalam konteks pembangunan bangsa dan karakter (*nation and character building*) pendidikan kewarganegaraan dalam arti luas memiliki kedudukan, fungsi, dan peran yang sangat penting. Pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya merupakan salah satu bentuk pendidikan karakter yang dikembangkan secara sistematis dan sistemik. Dalam konteks itu pendidikan kewarganegaraan tidak bisa dipisahkan dari kerangka kebijakan nasional pembangunan bangsa dan karakter.

Pembangunan karakter bangsa merupakan gagasan besar yang dicetuskan para pendiri bangsa karena sebagai bangsa yang terdiri atas berbagai suku bangsa dengan nuansa kedaerahan yang kental, bangsa Indonesia membutuhkan kesamaan tentang budaya dan karakter yang holistik sebagai bangsa. Hal itu sangat penting karena menyangkut kesamaan pemahaman, pandangan, dan gerak langkah untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal pendidikan karakter yang sudah dibangun selama ini sejatinya perlu penguatan dari sisi ideologi kebangsaan dan kesantunan sehingga pendidikan dapat melahirkan warga negara yang berilmu, kokoh secara ideologi dan juga mempunyai kesantunan. Dalam konteks berbangsa pendidikan karakter adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana serta proses pemberdayaan potensi dan pembudayaan peserta didik guna membangun karakter pribadi atau kelompok yang unik atau baik sebagai warga Negara. Hal ini diharapkan mampu memberikan kontribusi optimal dalam mewujudkan masyarakat yang berketuhana yang maha esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berjiwa persatuan Indonesia, berjiwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Strategi pembangunan karakter bangsa melalui pendidikan dapat dilakukan dengan pendidikan dan pembelajaran. Pendidikan merupakan tulang punggung strategi pembentukan karakter bangsa terkhusus dalam pembelajaran PKn karena memang misinya adalah mengembangkan nilai dan sikap pengembangan karakter. Pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia. Nilai luhur dan moral ini diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku kehidupan siswa sehari-hari, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan usaha untuk membekali siswa dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antarwarga dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembangunan karakter bangsa melalui pendidikan kewarganegaraan.

KAJIAN TEORITIS

1. Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan (*citizenship*) yang merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosial-budaya, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang dilandasi oleh Pancasila dan UUD 1945. Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berfungsi sebagai wahana untuk menjadi warga negara yang baik (*to be good citizenship*), cerdas, terampil, dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia yang merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai Pancasila dan UUD 1945. Dengan mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan, dapat memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara serta mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kewarganegaraan, seperti persatuan dan kesatuan bangsa, menjaga nilai dan norma, hak asasi manusia, kekuasaan dan politik, masyarakat demokratis, Pancasila dan konstitusi Negara, serta globalisasi. Oleh karena itu, dapat diwajibkan kepada warga negara untuk menguasai Pendidikan Kewarganegaraan dan dapat mengembangkan kemampuan-kemampuan sebagai berikut:

1. Berpikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam menghadapi masalah kewarganegaraan termasuk masalah globalisasi.
2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab serta bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan pada karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup secara berdampingan dengan sesama.
4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi tanpa meninggalkan jati diri bangsa.

Mengenai pengertian Pendidikan Kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, orang tua yang kesemuanya itu diproses guna melatih siswa sebagai generasi muda untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pendidikan Kewarganegaraan didefinisikan sebagai suatu bidang kajian yang mempunyai objek telaah kebijakan dan budaya kewarganegaraan, menggunakan disiplin ilmu pendidikan dan ilmu politik sebagai kerangka keaja keilmuan pokok serta disiplin ilmu-ilmu yang lain. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran dan sebagai mata kuliah merupakan salah satu status pendidikan kewarganegaraan yang praksis dalam pendidikan di Indonesia

sekarang ini. Sebagai mata pelajaran di sekolah, PKn berdasarkan Permendiknas no 22 tahun 2006 tentang standar isi. Menurut ketentuan tersebut, PKn adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajiban untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

2. Pendidikan dan Pembangunan Karakter Bangsa

Pembinaan moral dan karakter bangsa sangat terkait erat dengan peningkatan kualitas pembangunan pendidikan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam kaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, maka pemerintah telah bertekad untuk menjadikan pendidikan menjadi landasan utama dalam pembinaan dan penumbuhkembangkan karakter positif bangsa. Untuk itu maka pemerintah telah menetapkan bahwa pembangunan pendidikan harus diarahkan pada tiga hal pokok, yaitu: Pertama, pendidikan sebagai sarana untuk membina dan meningkatkan jati diri bangsa untuk mengembangkan seseorang sehingga sanggup mengembangkan potensi yang berasal dari fitrah insani, dari Tuhan. Pembinaan jati diri akan mendorong seseorang memiliki karakter yang tangguh yang tercermin pada sikap dan perilakunya. Tanpa adanya jati diri, suatu bangsa akan mudah terombang-ambing dan kehilangan arah dari terpaan tantangan globalisasi yang bergerak cepat dewasa ini.

Kedua, pendidikan sebagai media utama untuk menumbuhkembangkan kembali karakter bangsa Indonesia, yang selama ini dikenal sebagai bangsa yang ramah tamah, bergotong-royong, tangguh, dan santun. Sehingga apabila karakter ini dapat kita bangun kembali, kita perkuat, maka Insya Allah, kita akan mampu menghadapi setiap krisis dan tantangan masa depan.

Ketiga, pendidikan sebagai tempat pembentukan wawasan kebangsaan, yaitu perubahan pola pikir warga bangsa yang semula berorientasi pada kesukuan menjadi pola pikir kebangsaan yang utuh. Melalui wawasan kebangsaan dapat dibangun masyarakat yang saling mencintai, saling menghormati, saling mempercayai, dan bahkan saling melengkapi satu sama lain, dalam menyelesaikan berbagai masalah pembangunan.

3. Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan dan Sebagai Wahana Pendidikan Karakter Bangsa

Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) merupakan salah satu bidang kajian yang mengemban misi nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui koridor “*value-based education*”. Konfigurasi atau kerangka sistemik Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dibangun atas dasar paradigma sebagai berikut. *Pertama*, PKn secara kurikuler dirancang sebagai subjek pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu agar

menjadi warga negara Indonesia yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab. Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pendidikan yang wajib diberikan di semua jenjang pendidikan termasuk jenjang pendidikan tinggi. *Kedua*, PKn secara teoretik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang memuat dimensi-dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang bersifat *konfluen* atau saling berpenetrasi dan terintegrasi dalam konteks substansi ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara. *Ketiga*, PKn secara programatik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang menekankan pada isi yang mengusung nilai-nilai (*content embedding values*) dan pengalaman belajar (*learning experiences*) dalam bentuk berbagai perilaku yang perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan tuntunan hidup bagi warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, ber-bangsa, dan bernegara sebagai penjabaran lebih lanjut dari ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara (Winataputra dan Budimansyah, 2007). Jika memperhatikan uraian tersebut, maka tampak bahwa PKn merupakan program pendidikan yang sangat penting untuk upaya pembangunan karakter bangsa.

Sebagai suatu program pendidikan yang amat strategis bagi upaya pendidikan karakter, PKn perlu memperkuat posisinya menjadi “subjek pembelajaran yang kuat” (*powerful learning area*) yang secara kurikuler ditandai oleh pengalaman belajar secara kontekstual dengan ciri-ciri: bermakna (*meaningful*), terintegrasi (*integrated*), berbasis nilai (*valuebased*), menantang (*challenging*), dan mengaktifkan (*activating*). Melalui pengalaman belajar semacam itulah para mahasiswa difasilitasi untuk dapat membangun pengetahuan, sikap, dan keterampilan kewarganegaraan yang demokratis dalam koridor psiko-pedagogis-konstruktif.

Salah satu model adaptif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PKn sebagai wahana pendidikan karakter adalah melalui *Project Citizen Bhinneka Tunggal Ika*. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menghasilkan kompetensi kewarganegaraan (*civic competences*) yang memberikan bekal menuju “*to be a good citizens*” (terbentuknya warga negara yang baik). Dengan demikian, kompetensi kewarganegaraan dapat dimaknai sebagai pengetahuan, nilai dan sikap, serta ketrampilan mahasiswa yang mendukungnya menjadi warga negara yang partisipatif dan bertanggungjawab dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Mengacu pada SK Dirjen Dikti No. 43 tahun 2006 pada pasal 3 tentang kompetensi dasar ayat 2b, menyebutkan tentang kompetensi mahasiswa dengan menempuh Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah: “Menjadi ilmuwan dan professional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air; demokratis dan berkeadaban, menjadi warga negara yang memiliki daya

saing, berdisiplin, berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila.”

Pengembangan kompetensi kewarganegaraan yang bercirikan multi-kultural diarahkan sebagai upaya pengembangan warganegara multikultural melalui pendidikan kewarganegaraan. Pada konteks ini, kompetensi kewarganegaraan multikultural yang dimaksud dapat didasarkan pada empat dimensi kewarganegaraan sebagaimana dikemukakan Cogan (1998), yaitu *the personal, social, spatial, dan temporal dimension* untuk selanjutnya dirumuskan dalam tiga komponen kewarganegaraan sebagaimana dikemukakan Branson (1998), yaitu *civic knowledge, civic skill, and civic disposition*.

Kewarganegaraan multidimensi terdiri atas empat dimensi pokok yaitu: (1) dimensi pribadi (*personal*), (2) dimensi sosial, (3) dimensi spasial, dan (4) dimensi temporal. Dimensi pribadi dari kewarganegaraan multidimensi membutuhkan pengembangan satu kapasitas pribadi dan komitmen untuk etika warganegara yang dikarakteristikan oleh kebiasaan pikiran, perasaan dan tindakan secara individu dan sosial. Sebagai warga negara, setiap individu harus meningkatkan: (a) kapasitas untuk berpikir secara kritis dan sistematis; (b) pemahaman dan kepekaan terhadap masalah-masalah perbedaan-perbedaan budaya; (c) pilihan terhadap pemecahan dan penyelesaian masalah yang bertanggung jawab, kooperatif dan tanpa kekerasan, dan (d) keinginan untuk melindungi lingkungan, membela hak asasi manusia, dan ikut serta dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan perkembangan mutakhir, dimana tujuan PKn adalah partisipasi yang bermutu dan bertanggung jawab dari warga negara dalam kehidupan politik dan masyarakat baik pada tingkat lokal maupun nasional, maka partisipasi semacam itu memerlukan penguasaan sejumlah kompetensi kewarganegaraan. Sejumlah kompetensi yang diperlukan, yang terpenting adalah: (1) penguasaan terhadap pengetahuan dan pemahaman tertentu, (2) pengembangan kemampuan intelektual dan partisipatoris, (3) pengembangan karakter dan sikap mental tertentu, dan (4) komitmen yang benar terhadap nilai dan prinsip dasar demokrasi konstitusional. Berdasarkan kompetensi yang perlu dikembangkan, terdapat tiga komponen utama yang perlu dipelajari dalam PKn yaitu *civic knowledge, civic skills, dan civic dispositions*.

Civic Knowledge (pengetahuan kewarganegaraan) berkaitan dengan kandungan atau apa yang seharusnya diketahui oleh warganegara. *Civic Skills* (kecakapan kewarganegaraan) mencakup kecakapan intelektual dan kecakapan berpartisipasi. *Civic disposition* (watak kewarganegaraan) mengisyaratkan pada karakter publik maupun privat yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional.

Mengutip pendapat Branson (1998) maka konstruk karakteristik warga negara dimaksud adalah kompetensi kewarganegaraan (*civic competence*) yang

diformulasikan ke dalam tiga komponen penting, yaitu: 1) *Civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan), berkaitan dengan kandungan atau apa yang seharusnya diketahui oleh warga negara; 2) *Civic skill* (kecakapan kewarganegaraan), adalah kecakapan intelektual dan partisipatoris warga negara yang relevan; dan 3) *Civic disposition* (watak kewarganegaraan) yang mengisyaratkan pada karakter publik maupun privat yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional Branson (1998:16).

Sebagai realisasinya, salah satu alternatif pelaksanaan kebijakan yang bisa ditempuh adalah melalui pengembangan praksis pendidikan melalui model pembelajaran PKn Multikultural berbasis kearifan lokal sebagai bagian dari pendidikan karakter di sekolah dan sebagai pusat praksis pendidikan (*eduentrum*) manusia seutuhnya. Pendidikan karakter warga negara multi-kultural yang berbasis kearifan lokal merupakan praksis pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik dengan menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik secara aktif, bebas dan bertanggung jawab mengembangkan seluruh potensi dirinya sehingga menjadi pribadi berakhlak mulia, menjadi manusia seutuhnya dalam totalitasnya sebagai manusia. Pendidikan karakter melalui PKn Multikultural berbasis kearifan lokal adalah sebuah keniscayaan bagi transformasi moralitas bangsa agar mampu keluar dari belitan sumber krisis multidimensi yaitu krisis nilai.

PKn multikultural berbasis kearifan lokal adalah sebuah model pembelajaran yang dikembangkan di dunia persekolahan (perguruan tinggi) yang didasarkan pada teori bahwa PKn merupakan salah satu ujung tombak dari pendidikan multikultural dalam rangka pembentukan karakter warga negara multikultural yang menghargai identitas budaya masyarakat yang plural secara demokratis, dan membentuk mosaik yang indah (*cultural pluralism: mozaik analogy*) dalam satu semboyan Bhinneka Tunggal Ika (Ricardo L. Garcia, 1982: 37-42).

Sebagai sebuah model pembelajaran, pengembangan PKn Multikultural Berbasis Kearifan Lokal di sekolah/PT dengan pendekatan inkuiri sosial memiliki karakter menghargai potensi, kreativitas dan keragaman individual-kultural siswa. Pengembangan PKn multikultural menjadi kebutuhan bangsa Indonesia yang ditandai oleh kemajemukan (*plurality*) dan keanekaragaman (*heterogenity*). PKn multikultural menjadi sebuah keniscayaan bagi wahana desimnasi pemahaman multikulturalisme melalui jargon pendidikan multikultural, yang secara sinergis terkait erat dengan pendidikan budaya dan karakter bangsa.

METODE PENULISAN

Penulisan menggunakan metode tinjauan literatur (*library research*) yaitu metode penulisan yang didasarkan pada pendapat-pendapat ahli dan hasil penelitian terdahulu.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

PKn memiliki peranan penting sebagai wahana untuk mengembangkan kemampuan, watak dan warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. PKn memiliki misi sebagai pendidikan karakter adalah membentuk warga negara yang memiliki sikap dan perilaku yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Hermanto (2013 p. 231) memaparkan bahwa “pendidikan kewarganegaraan memiliki peranan yang sangat penting dalam menumbuh kembangkan pola pikir, sikap dan perilaku rukun, damai serta toleran tanpa meninggalkan kebhinnekaan yang memang sudah menjadi given-nya bangsa Indonesia”. Pendidikan Kewarganegaraan dalam membangun peradapan di Indonesia khususnya membangun karakter bangsa memiliki tujuan nasional, sehingga tidak dipungkiri Pendidikan Kewarganegaraan adalah pembelajaran yang wajib diberikan di setiap jenjang pendidikan, baik sekolah dasar, menengah maupun di perguruan tinggi. Ubedillah dan Rozak (2013) mengungkapkan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai wahana pembangunan karakter bangsa memiliki tujuan antara lain sebagai berikut :

1. Membentuk kecakapan partisipatif warga negara yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
2. Menjadikan warga negara Indonesia yang cerdas, aktif, kritis dan demokratis, namun tetap memiliki komitmen menjaga persatuan dan integritas bangsa
3. Mengembangkan kultur demokrasi yang berkeadapan, yaitu kebebasan, persamaan, toleransi dan tanggung jawab.

Pendidikan Kewarganegaraan dalam membangun warga negara yang baik mengembangkan tiga kompetensi yaitu pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge), keterampilan kewarganegaraan (civic skills) dan karakter (civic disposition). Syarat utama untuk menjadi warga negara yang baik harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan karakter yang berdasarkan Pancasila. Apabila ketiga kompetensi yang dimiliki oleh setiap warga negara, maka secara langsung maupun tidak langsung warga tersebut adalah individu yang berkompeten, berkomitmen, dan memiliki kepercayaan diri.

Mengingat pentingnya fungsi dan kedudukan Pancasila dalam tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara maka, pendidikan Pancasila sebagai instrumental untuk membangun warga negara yang baik (*good citizenship*) yang berkarakter Pancasila dan meyakini kebenaran dan kekuatan Pancasila dalam mencapai cita harus diberikan kepada setiap generasi bangsa. Persoalannya adalah apakah isi substansi materi yang akan diberikan serta fokus penekanan yang kita prioritaskan dari ketiga fungsi Pancasila tersebut.

PKn merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajiban yang menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan pada kurikulum 1994 disebutkan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) adalah mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya perilaku dalam kehidupan sehari-hari siswa sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, dan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Di samping itu PPKn juga dimaksudkan untuk membekali siswa dengan budi pekerti, pengetahuan dan

kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antar warga negara dengan negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.

Kemudian secara tegas disebutkan bahwa tujuan PPKn adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan kemampuan memahami menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan dapat diandalkan serta memberi bekal kemampuan untuk belajar lebih lanjut. Dari tujuan juga jelas berbeda. PPKn lebih menekankan pada pembentukan karakter (efektif), sedangkan PKn lebih menekankan pada aspek berpikir kritis (kognisi). Sebenarnya antar moralitas dengan berpikir bukan dua hal yang terpisah sama sekali. Keduanya mempunyai hubungan kemampuan berpikir/ kognisi seharusnya membimbing perilaku, sehingga semakin tinggi tingkat pengetahuan juga semakin baik sikap dan moralnya, sebagaimana dalam pepata "ilmu padi" semakin berisi semakin merunduk. Secara filosofis buah dari ilmu itu adalah *wisdom*/bijaksana. Oleh karena itu seharusnya pendidikan mampu merubah perilaku seseorang, semakin tinggi tingkat pendidikannya maka, semakin bijak sikap dan perilakunya.

KESIMPULAN

Pekerjaan besar bangsa saat Indonesia saat ini harus mengembalikan karakter bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Hal ini dapat dimulai dengan memberikan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan cara baik dan benar, sehingga dapat meningkatkan nilai-nilai karakter bagi setiap masyarakat. Pendidikan dimulai dari proses pendidikan serta ide-ide solutif dari berbagai pihak. Pada saat ini bangsa Indonesia mengalami penurunan konsep moral dan mentalitas akan suatu ideologi asli bangsa Indonesia. Dengan demikian pendidikan karakter tepat untuk mengembalikan nilai-nilai kepribadian setiap warga negara, tetapi hal itu harus diapresiasi oleh semua pihak, walaupun hasilnya akan tercapai setelah satu generasi bangsa Indonesia.

Pembelajaran PKn di sekolah dasar dimaksudkan sebagai suatu proses belajar mengajar dalam rangka membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik dan membentuk manusia Indonesia seutuhnya dalam pembentukan karakter bangsa yang diharapkan mengarah pada penciptaan suatu masyarakat yang menempatkan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada Pancasila, UUD dan norma-norma yang berlaku dimasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aly, Abdullah. (2005). Pendidikan Multikultural dalam Tinjauan Pedagogik. Makalah dipresentasikan pada Seminar Pendidikan Multikultural sebagai Seni Mengelola Keragaman, yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial (PSB-PS) Universitas Muhammadiyah Surakarta, pada Sabtu, 8 Januari 2005.
- Azra, Azyumardi. (2004). Demokrasi Multikultural. *Harian Republika*, 12 Agustus 2004.

- . (2006). Pancasila dan Identitas Nasional Indonesia: Perspektif Multikulturalisme. Dalam Restorasi Pancasila: Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas. Bogor: Brighten Press.
- Blum, Lawrence A. (2001). Antirasisme, Multikulturalisme, dan Komunitas Antar-Ras: Tiga Nilai yang Bersifat Mendidik bagi Sebuah Masyarakat Multikultural. Dalam May, Larry, Shari Collins-Chobanian, and Kai Wong (Eds). Etika Terapan I: Sebuah Pendekatan Multikultural. Terjemahan oleh Sinta Carolina dan Dadang Rusbiantoro. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Branson, Margaret S. (1998). The Role of Civic Education. Calabasas: CCE.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Muchson A. R (2003). Pendidikan Kewarganegaraan Paradigma Baru dan Manifestasinya dalam Kurikulum Berbasis Komperensi. *Makalah* disampaikan dalam Seminar Nasional Kurikulum Berbasis Kompetensi. 2002 Kewarganegaraan diselengaran oleh Program Studi PPKn FKIP UNS, 29 Maret 2003.
- Saifuddin, Achmad Fedyani. (2006). Reposisi Pandangan mengenai Pancasila: Dari Pluralisme ke Multikulturalisme. Dalam Restorasi Pancasila: Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas. Bogor: Brighten Press.
- Suparlan, Parsudi. (2005). Sukubangsa dan Hubungan Antar Sukubangsa. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
- Saptono. (2011). Dimensi-dimensi Pendidikan Karakter. Erlangga, Jakarta.
- Setiawan, D. (2014). Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Karakter melalui Penerapan Pendekatan Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan, *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 6 (2): 61-72.
- Suharyanto, A., (2013). Peranan Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membina Sikap Toleransi Antar Siswa, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 2 (1): 192-203
- Suryadinata, Leo. dkk. (2003). *Indonesias Population: Ethnicity and Religion in a Changing Political Landscape*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Tilaar, H.A.R. (2004). *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Grasindo.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Winataputra, Udin S. dan Dasim Budimansyah. (2007). *Civic Education: Konteks, Landasan, Bahan Ajar dan Kultur Kelas*. Bandung: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan SPs UPI.